Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan

Anggi Setia Lengkana¹, N. Siti Nuraeni Sofa²

¹UPI Kampus Sumedang, ²STKIP Sebelas April Sumedang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2017

Disetujui Maret 2017

Dipublikasikan April 2017

Keywords:

kelincahan, kecepatan, motivasi berlatih, kemampuan menggiring bola.

Abstrak

Pendidikan di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang, meskipun terdapat sebagian orang yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia terpuruk. Pada hakikatnya bukan hasil pendidikan yang terpuruk melainkan standar pendidikan yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju memang pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, namun jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya kualitas pendidikan di Indonesia sudah patut dikategorikan baik. Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah sangat banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional.

Abstract

Education in Indonesia is now increasingly growing, although there are some people who say that education in Indonesia has fallen. In essence, it is not the outcome of the worst education but the standard of education which always increases every year. When compared with developed countries, education in Indonesia is still relatively low, but when compared with other developing countries, the quality of education in Indonesia deserves to be categorized as good. The policies that regulate education are already very numerous, making it easier and providing space for Indonesian education personnel to continue to innovate and build character education in accordance with national education expectations.

© 2017 Anggi Setia Lengkana, N. Siti Nuraeni Sofa
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu subsistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap subsistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Salah satu bentuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah agar memberikan jaminan terhadap pendidikan sebagai sebuah sistem yaitu dengan terbitnya UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut cara pandang yang berbeda tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Dulu, pengembangan kurikulum dilakukan oleh pusat dalam hal ini Pusat Kurikulum sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pendidikan. UU tersebut merupakan produk hukum yang berketetapan dan berkekuatan hukum, dalam UU tersebut pun sudah diatur mengenai hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan pendidikan di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru, yang kualitatif dan berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pendidikan (Rusyanti,

2013: 7). Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, program-program, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya ada yang berkaitan dengan Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada standar isi. Pada tanggal 15 Juli 2013, secara resmi Kurikulum 2013 dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia. Namun penerapannya masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kebijakan terbaru dari Kementerian pendidikan dalam usahanya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Berbicara tentang perbedaan antara Kurikulum 2013 dan KTSP, perbedaan yang paling menonjol adalah dalam KTSP, kegiatan mengenai pengembangan silabus merupakan kewenangan dari satuan pendidikan, sedangkan dalam kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kegiatan pengembangan silabus adalah kewenangan pemerintah, namun terdapat pengecualian untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus diberlakukan di satuan pendidikan tertentu. Kebijakan ini tentunya berdampak kepada mata pelajaran disetiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA. Salah satu mata pelajaran adalah Penjas, dengan perubahan kurikulum tentunya mata pelajaran penjas juga akan mengalami perubahan, apakah itu dari segi pembuatan Silabus, RPP, Buku, serta penilaiannya.

Apalagi dalam kurikulum 2013 guru dituntut lebih kreatif, lebih profesional dalam mengajar, agar permasalahan yg dihadapi dapat dituntaskan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata berdampak pula terhadap perkembangan pendidikan jasmani di Negara Indonesia, hal ini terlihat dengan rendahnya perhatian publik terhadap pentingnya pendidikan jasmani bagi anak-anak. Mereka berpandangan bahwa anak-anak haruslah dijejali dengan pelajaran-pelajaran yang diujikan sehingga dapat menjamin pada pendidikan mereka selanjutnya, tanpa memperhatikan untuk dapat menguasai semua itu anak-anak pun harus mempunyai kondisi yang sempurna baik jiwa dan raga.

Untuk mendapatkan semua itu tentunya tidak lepas dari apa yang harus diberikan kepada mereka disesuaikan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan anak baik itu secara jiwa dan raga, sehingga kita mampu mengarahkan anak-anak kita agar mencapai kematangan intelektual dan emosional. untuk menghilangkan anggapan bahwa pendidikan jasmani merupakan pelajaran pelengkap saja, maka kita harus bisa meyakinkan persepsi para pengambil kebijakan khususnya dan masyarakat pada umumnya agar pendidikan jasmani tidak dijadikan sebagai pelajaran pelengkap saja di sekolah-sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Syafaruddin, 2008:75). Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku

untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 2003). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan.

Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro. Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara.

1. Fungsi Kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi

sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

2. Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan

kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;

- a. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional;
- b. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
- c. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
- d. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
- f. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia

usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

3. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoretik pada tahap implementasi ini proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik, perbedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

• Pandangan Publik Tentang Pendidikan Jasmani

From many years of teaching and observation in between East and West that author has felt strongly about that the physical education is becoming more and more isolated, segregated and discriminated. (Prefessor Peter Chen ;). Menurut pandangan Professor Peter Chen bahwa beberapa tahun

terakhir pendidikan jasmani terisolasi, terasing, dan terdiskriminasi. Hal ini di Indonesia pun bisa terlihat dengan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah hanyalah merupakan pelajaran pelengkap saja, berbeda dengan pelajaran-pelajaran lain seperti; Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, dan Biologi. Apa turun kelapangan atau ke sekolah-sekolah pandangan seperti itu sangat jelas terlihat. Marilah kita tinjau faktor-faktor yang menyebabkan pandangan publik menjadi demikian:

• Status Marjinal dalam Kurikulum

Apabila kita pelajari sejarah perkembangan pendidikan jasmani dari tahun ke tahun maka akan terlihat pluktuasi atau naik turunnya pendidikan jasmani. Di beberapa negara Eropa masih terdapat perbedaan status akademik pendidikan jasmani. “Pada tahun 1960-an terjadi perubahan di beberapa negara. Kebugaran jasmani dianggap sebagai bagian penting dari tujuan pendidikan jasmani baik di Barat maupun di Timur. Hingga pada tahun 1970-an merupakan puncak perkembangan pendidikan jasmani dengan peningkatan yang sangat drastis ditandai dengan perbaikan fasilitas peningkatan kualitas guru pendidikan jasmani dan pengalokasian jam pelajaran 3 jam pelajaran perminggu.” (Lutan;1999).

Sekitar tahun 1980 maka kemunduran pendidikan jasmani terjadi kembali salah satu tandanya dengan dikurangnya kembali jumlah jam pelajaran perminggu menjadi 2 jam pelajaran. Pendidikan jasmani tidak dijadikan sebagai pelajaran yang dapat mempengaruhi untuk melanjutkan sekolah. Pada sekitar tahun 2001 melalui kurikulum 1994 pelajaran pendidikan jasmani mulai diperhitungkan sebagai pelajaran yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melanjutkan setudi meskipun perbadingannya hanya 20%, sedangkan pelajaran yang lain berbobot 80%. Tapi mudah-mudahan hal ini merupakan awal

kebangkitan kembali pendidikan jasmani, apalagi pada kurikulum baru 2004 yang sampai saat ini masih dalam taraf sosialisasi jumlah jam pendidikan jasmani bertambah seperti pada era tahun 1970-an yaitu 3 jam pelajaran perminggu.

- Krisis pendidikan secara umum

Hasil kajian Coomb (1980) yang dikutip dari Lutan (1999): “Krisis dunia dalam pendidikan, boleh digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami krisis dalam pendidikan jasmani. Krisis pendidikan terjadi karena 4 faktor sebagai berikut:

- a. Peningkatan aspirasi pendidikan yang berkaitan dengan laju pertumbuhan kependudukan;
- b. Langkanya sumberdaya pendukung kegiatan, bukan hanya sumber daya manusia tetapi juga anggaran biaya pendidikan yang terbatas;
- c. Lambannya sistem pendidikan yang beradaptasi dengan perubahan;
- d. Tradisi dan sistem nilai dalam lembaga pendidikan untuk bertahan terhadap pengaruh inovasi dari luar.”

Krisis pendidikan jasmani pada tatanan global ini juga sangat dipengaruhi oleh globalisasi dunia yang memfokuskan pada globalisasi dalam ekonomi, serta komunikasi yang kian marak di dunia. Hal ini mau tidak mau menjadi salah satu faktor penyebab pendidikan jasmani menjadi terisolasi dan terabaikan. Para pengambil kebijakan selalu terburu-buru dalam mengimbangi globalisasi ini dengan orientasi kebijakan dititik beratkan kepada kebijakan ekonomi dan politik, padahal apabila kita orientasi jangka panjang bahwa untuk mengimbangi globalisasi ini hendaklah kita membentuk sumber daya manusia yang “*survival*” mampu bersaing baik itu secara pengetahuan, jasmani dan rohani.

- Orientasi Penjas pada Prestasi

Tidak ada yang harus disalahkan bahwa gerakan pesta-pesta olahraga baik itu

ditingkat daerah, Nasional, maupun Internasional berhasil menyebarluaskan semangat berolahraga di mana-mana. Tapi sebagai eksese dari hal tersebut, para pengambil kebijakan selalu mengorientasikan olahraga pada prestasi belaka tidak menyadari akan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sehingga pendidikan jasmani dijadikan sebagai sasaran untuk mengejar prestasi olahraga baik ditingkat daerah, Nasional, dan Internasional. Akibat para pengambil kebijakan berlaku seperti itu, maka publik dalam hal ini orang tua siswa beranggapan bahwa pelajaran pendidikan jasmani atau lebih populer olahraga di sekolah menekankan anak-anak untuk menjadi berprestasi dalam salah satu cabang olahraga. Padahal kalau para pengambil kebijakan dapat memaparkan filsafat yang sebenarnya yang terkandung dalam pendidikan jasmani maka anggapan publikpun akan lain terhadap pendidikan jasmani.

- Kemaslahatan Pendidikan Jasmani

Apabila kita mendengar kata pendidikan jasmani maka kita langsung menginterpretasikan bahwa itu adalah pelajaran olahraga di sekolah-sekolah, yang sebagian orang hanya berorientasi pada gerakan-gerakan fisik semata. Padahal dalam konsep yang sebenarnya pendidikan jasmani merupakan satu kesatuan yang utuh terdiri atas “aktivitas jasmani dan penanaman “nilai-nilai rohani”, berakar pada pandangan kelasik yaitu “*body and mind*”. (Mendikbud 413/U/1957) dikutip dari Lutan (2001): “Pendidikan Jasmani adalah bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual dan emosional.”

Dalam hal lain Peter Chen mendefinisikan pendidikan jasmani sebagai berikut: “*Physical education is an integral part of total education in which the concepts*

of total well-being is the central core to the subject of physical education. Total well-being involves physical, mental and emotional, social and spiritual well-being". Dari dua pandangan di atas jelaslah terlihat perbedaan bahwa Peter Chen menambahkan unsur sosial dan spiritual, sedangkan pengertian menurut mendikbud hanya berorientasi pada fisik, intelektual, dan emosional saja.

Oleh sebab itu maka selayaknya kita sebagai orang-orang yang mempunyai wawasan tentang olahraga secara luas, sepatutnya kita harus dapat meyakinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya pendidikan jasmani sebagai salah satu pelajaran yang dapat membimbing proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun esensi yang harus dilakukan untuk memperbaiki image publik terhadap Pendidikan Jasmani adalah:

- Membuktikan secara empirik kemaslahatan Pendidikan Jasmani.

Untuk dapat membuktikan secara empirik, para peneliti banyak melakukan riset-riset mengenai pembuktian hal tersebut. Lutan (2002) mengatakan bahwa "hasil riview Bernett terhadap 60 hasil riset sampai pada kesimpulan yang memantapkan kepercayaan bahwa bermain bagi anak berdampak terhadap peningkatan kemampuan memecahkan masalah, serta berdampak positif untuk peningkatan kreativitas". Aktivitas jasmani memiliki peranan penting terhadap perkembangan kognitif dan intelektual siswa melalui pengalaman sekolah, serta partisipasi dalam ekstrakurikuler dapat mengurangi angka drop out siswa khususnya pada siswa yang bermasalah.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan ekstrakurikuler.

Peran serta masyarakat pada kegiatan ekstrakurikuler disekolah sangat diperlukan, selain dapat membantu sekolah juga maka

masyarakat yang terlibat didalamnya dapat mengetahui hakikat dari pembinaan anak-anak melalui aktivitas jasmani sehingga mereka dapat meyakinkan masyarakat yang lainnya terhadap peranan aktivitas jasmani bagi anak-anak mereka.

- Mempasilitasi siswa berprestasi.

Praktik yang sistematis dan terencana dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk meningkatkan mutu penyajian bahan ajar, selain dapat menghasilkan tujuan pengajaran berupa peningkatan kemampuan partisipasi dalam aktivitas jasmani, juga dapat berdampak terhadap perkembangan emosi, sosial, kognitif, serta pengalaman sepiritual. Selain itu melalui pendidikan jasmani maka akan munculah atlet-atlet berpotensi yang kemudian dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang menjadi permasalahan setelah siswa tersebut berprestasi disalah satu cabang olahraga, maka fasilitas harus diberikan kepada mereka minimal menjamin mereka agar dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan peran siswa dalam aktivitas jasmani di sekolah-sekolah serta pihak orang tua tidak akan melarang aktivitas jasmani anak-anaknya dalam kegiatan ekstrakurikuler.

- Memperbaiki sistem dalam kurikulum pendidikan jasmani.

Kurikulum dalam pengajaran khususnya kurikulum pendidikan jasmani merupakan faktor penting bagi kelangsungan proses pengajaran Pendidikan Jasmani. Apabila sistem dalam kurikulum tersusun sistematis maka proses aktivitas jasmani akan terlaksana dengan baik.

- Peningkatan mutu guru pendidikan jasmani.

Hal ini merupakan faktor penting bagi pengembalian kepercayaan publik terhadap Pendidikan Jasmani, karena guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan proses pengajaran Pendidikan Jasmani di sekolah-

sekolah. Bahkan Presiden Vietnam Ho Chi Minh yang dikutip dari H. M Surya menyatakan bahwa *“No teacher, no education”* atau tidak ada guru maka tidak ada pendidikan, yang kemudian disajikan landasan kebijakan pemerintah dalam membangun Vietnam yang berbasiskan pendidikan dengan guru sebagai basisnya.” Melalui ungkapan di atas sangat jelas bahwa guru merupakan inti dari sebuah proses pendidikan. Dalam peningkatan mutu guru pendidikan jasmani maka seorang guru pendidikan jasmani harus dapat menjaga kaidah-kaidah yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Selain itu juga khususnya guru Pendidikan Jasmani harus terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, serta harus kreatif dan inovatif.

- Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan

Didalam Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional BAB I Ketentuan Umum point 11 yang dimaksud dengan Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Dalam UU No. 3 tahun 2005 dalam ruang lingkup olahraga dibagi menjadi 3 ; a) Olahraga Pendidikan, b) Olahraga Rekreasi, c) Olahraga Prestasi. Pasal 18 ayat 1 sampai 9 berisi tentang olahraga pendidikan. Jadi sangat jelas pendidikan jasmani juga dibahas didalam UU ini.

Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan (Mahendra, 2004). Menurut Lutan (2004) Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan. Karena itu pula tujuannya pun bersifat mendidik. Dalam pelaksanaannya aktivitas

jasmani dipakai sebagai wahana atau pengalaman belajar dan melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain pendidikan jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani dan sekaligus pula sebagai proses ajar untuk menguasai keterampilan jasmani.

Pendidikan jasmani sejak lama diakui sebagai media yang memiliki berbagai nilai lebih dalam proses pembentukan karakter anak. Pendidikan jasmani juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan jasmani memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan pendidikan pada umumnya yaitu memberi kontribusi yang sangat berharga dan memberi inspirasi bagi kesejahteraan hidup manusia. Makna yang terkandung dalam pendidikan jasmani tidak sekedar pendidikan yang bersifat fisik atau aktivitas fisik tetapi lebih luas lagi terkait dengan tujuan pendidikan secara menyeluruh serta memberi kontribusi terhadap kehidupan individu. Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui dan dari aktivitas jasmani. Sidentop (1990) mengatakannya sebagai *“ education through and of physical activities ”*. Permainan, rekreasi, ketangkasan, olahraga, kompetisi dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya merupakan materi-materi yang terkandung dalam pendidikan jasmani karena diakui mengandung nilai-nilai pendidikan yang hakiki.

1. Konsep Dasar Pendidikan Jasmani

Menurut Bucher (1972) pendidikan jasmani adalah bagian yang tak terpisahkan dengan proses pendidikan secara keseluruhan dan merupakan suatu usaha pengembangan fisik, mental, emosi dan social seluruh masyarakat melalui aktivitas fisik yang terpilih dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Semertara itu menurut Baley (1976) berpendapat bahwa pendidikan jasmani

adalah suatu proses belajar dan adaptasi dari pengembangan organik, neuromuskular, intelektual, sosial, kultural, emosional dan rasa keindahan yang merupakan hasil dari semangat melakukan aktivitas jasmani. Sedangkan Moston dan Singer (1980) berpendapat bahwa dalam pembelajaran pendidikan jasmani guru harus mengembangkan respon motorik, interaksi sosial, pertumbuhan emosi dan melibatkan aspek intelektual. Sedangkan pendidikan jasmani di Indonesia telah diterjemahkan dalam bentuk yang lebih operasional. Menurut Depdiknas (2003) Pendidikan Jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengendalian lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung sepanjang hayat yang diajarkan di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih yang diajarkan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang

secara alami berkembang searah dengan perkembangan zaman. Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan kognitif. Pandangan ini telah membawa akibat terabaikannya aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni, psikomotor, serta life skill.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan akan memberikan peluang untuk menyempurnakan kurikulum yang komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisiologi perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, kualitas fisik dan psikis yang seimbang.

2. Tujuan Pendidikan Jasmani

Tujuan pendidikan jasmani bukan hanya menekankan pada perkembangan aspek jasmani saja tetapi juga aspek lainnya seperti mental, sosial, emosional dan moral. Secara nyata tujuan pendidikan jasmani menurut Depdiknas (2003) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih.
- b. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik.
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.

- d. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
 - e. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis.
 - f. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
 - g. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif.
3. Pendidikan pada Strata Pengambil Kebijakan
- a. Pemerintah

Eratahun 2000-an ini telah dijadikan salah satu titik kebangkitan pendidikan jasmani di Indonesia. Munculnya berbagai kebijakan tentang pendidikan jasmani terutama upaya peningkatan kualitas guru penjas, perangkat kurikulum dan sarana menjadi salah satu fenomena menarik yang perlu dilanjutkan dan ditindaklanjuti. Harapan baru muncul bagi perkembangan pendidikan jasmani di masa yang akan datang. Kilas balik pendidikan jasmani pada masa lalu dan konsekuensinya pada masa sekarang. Pada saat bangsa Indonesia menomorsatukan perkembangan IPTEK dan sekolah sebagai dasar peletakan perkembangan IPTEK di Indonesia, saat itu mata pelajaran kelompok IPA menjadi mata pelajaran primadona dan menjadi salah satu barometer berhasil tidaknya pendidikan di Indonesia sehingga di ujian nasional mata pelajaran kelompok IPA begitu membuat siswa khawatir. Konsekuensi yang dihadapi oleh orangtua dan siswa serta sekolah adalah upaya yang maksimal untuk mendongkrak kemampuan siswa melalui tambahan

pelajaran di luar jam sekolah dan melalui lembaga-lembaga kursus. Harapannya tentu siswa akan memiliki nilai baik pada saat ujian nasional. Permasalahan ini tentu bermula dari berbagai kebijakan pendidikan oleh pemerintah pada masa itu yang memfokuskan mata pelajaran tertentu sebagai mata pelajaran penentu lulus dan tidaknya atau baik dan tidaknya siswa setelah mengikuti ujian nasional. Pertanyaannya yang perlu direnungkan adalah "bagaimana pendidikan jasmani dalam perspektif ujian nasional?"

Konsekuensi yang kemudian dihadapi mata pelajaran pendidikan jasmani dari kasus tersebut adalah menjadi mata pelajaran yang sedikit diabaikan. Kesalahan ini disinyalir bermuara pada kebijakan pemerintah yang belum mensejajarkan mata pelajaran pendidikan jasmani dengan mata pelajaran lain. Sehingga imbasnya adalah kurangnya perhatian terhadap pendidikan jasmani pada strata-strata dibawahnya.

b. Sekolah

Konsekuensi dari kebijakan pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional telah memposisikan mata pelajaran pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran yang dianggap kurang penting oleh berbagai pihak. Sekolah adalah strata penentu akhir kebijakan dari pelaksanaan pendidikan. Pada lebih dioperasionalkan. Namun dari berbagai kenyataan yang terjadi pada tingkat sekolah mata pelajaran pendidikan jasmani juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang terjadi tingkat diatasnya. Prioritas pengembangan dan peningkatan kualitas anak didik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu di luar penjas. Sebagai contoh. Anggaran belanja sekolah belum meletakkan kebutuhan mata pelajaran pendidikan jasmani dalam skala prioritas. Upaya supervisi terhadap pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani juga belum dilakukan dengan optimal. Kenyataan-kenyataan di lapangan

seperti ini yang kemudian menjadikan mata pelajaran pendidikan jasmani tetap dianggap lapis kedua dari struktur kurikulum secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah "mampukah sekolah melawan arus kecenderungan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan mata pelajaran tertentu di luar penjas dan menjadikan penjas sebagai salah satu mata pelajaran favorit?"

KESIMPULAN

Pendidikan jasmani sebagai salah satu pelajaran yang memiliki berbagai kelebihan hendaknya memiliki status yang sama pentingnya dengan mata pelajaran lain dalam perspektif orangtua, siswa, sekolah, dinas, dan pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah perhatian terhadap pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani sama dengan mata pelajaran lain terutama pemenuhan kebutuhan kelancaran dan kualitas pembelajaran. Makalah ini tidak untuk menemukan solusi, namun minimal membuka pandangan pembaca tentang bagaimana permasalahan yang sering dihadapi penjas. Solusi ada pada semua strata pengambil kebijakan dalam pendidikan juga guru, siswa dan orangtua.

Dengan membaca artikel ini hendaknya para guru-guru pendidikan jasmani lebih giat lagi untuk saling bahu membahu untuk meningkatkan kualitas mengajar, saling berbagi dalam pengetahuan yang baru didapat, dan tak bosan-bosanya menyuarakan bahwa matapelajaran pendidikan jasmani adalah pendidikan yang tidak boleh disepelekan dan harus menjadi prioritas disetiap jenjang pendidikan. dan hendaknya kepada kita suatu saat punya kesempatan ikut dalam penentu kebijakan agar memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk menjadikan penjas sebagai salah satu mata pelajaran yang menentukan serta prioritas dan bukan hanya sebagai pelengkap saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas.
- Baley, J.A, and Field, D.A (1976) *Physical Education and Physical Educator*. 2^d.ed. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Bucher, C.A. (1972) *Foundation of Physical Education*. 6^h .ed. Mosby.
- Depdiknas (2004) *Model pelaksanaan BBE Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar*. Depdiknas. Jakarta
- Depdiknas (2003) *Standar Kompetensi Mata pelajaran Pendidikan Jasmani*. Depdiknas. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press
- Lutan, Rusli. (1999). *Krisis Global Pendidikan Jamani; Reinterpretasi Hasil Kongres World Summit On Physical Education dan Kesan Tentang Keolahraagaan Jerman*. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan: Universitas Pendidikan Indonesia.
- _____ (2001). *Olahraga dan Etika Fair Play*. Direktorat Jendral Olahraga: Departemen Pendidikan Indonesia.
- _____ (2002). *Masalah, Tantangan dan Arah Pembangunan Pendidikan Jasmani di Indonesia*. Direktorat Jendral Olahraga: Departemen Pendidikan Indonesia.
- _____ (2004) *Perencanaan dan strategi pembelajaran Penjaskes*. Depdikbud. Jakarta
- Mahendra, Agus (2004) *Azas dan Falsafah Pendidikan Jasmani*. Depdikbud. Jakarta
- Peter Chen. (). *From a Global Mission to Our Mission as a Physical Educator and an Educator*. The

Graduate Institute of Sport Coaching
Science: Chinese Culture University.

Pengertian Kebijakan Pendidikan.html
diunduh tgl 24 januari 2015 pukul
13.20.

Perbedaan Kurikulum 2013 dan KTSP -
CBC- English Learning
Center_files.DIUNDUH TGL 24
Januari 2015 Pukul 13.50.

Siedentop, Daryl (1990) *Introduction to
Physical Education, Fitness, and Sport*.
Mayfield Publishing Company,
Mountain View, CA

Pongtuluran, Aris. 1995. *Kebijakan
Organisasi dan Pengambilan
Keputusan Manajerial*. Jakarta.

Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan
Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta

LPMP Posted by' Hetty Rusyanti on March 4,
2013 *KEBIJAKAN PENDIDIKA*;